LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

# PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

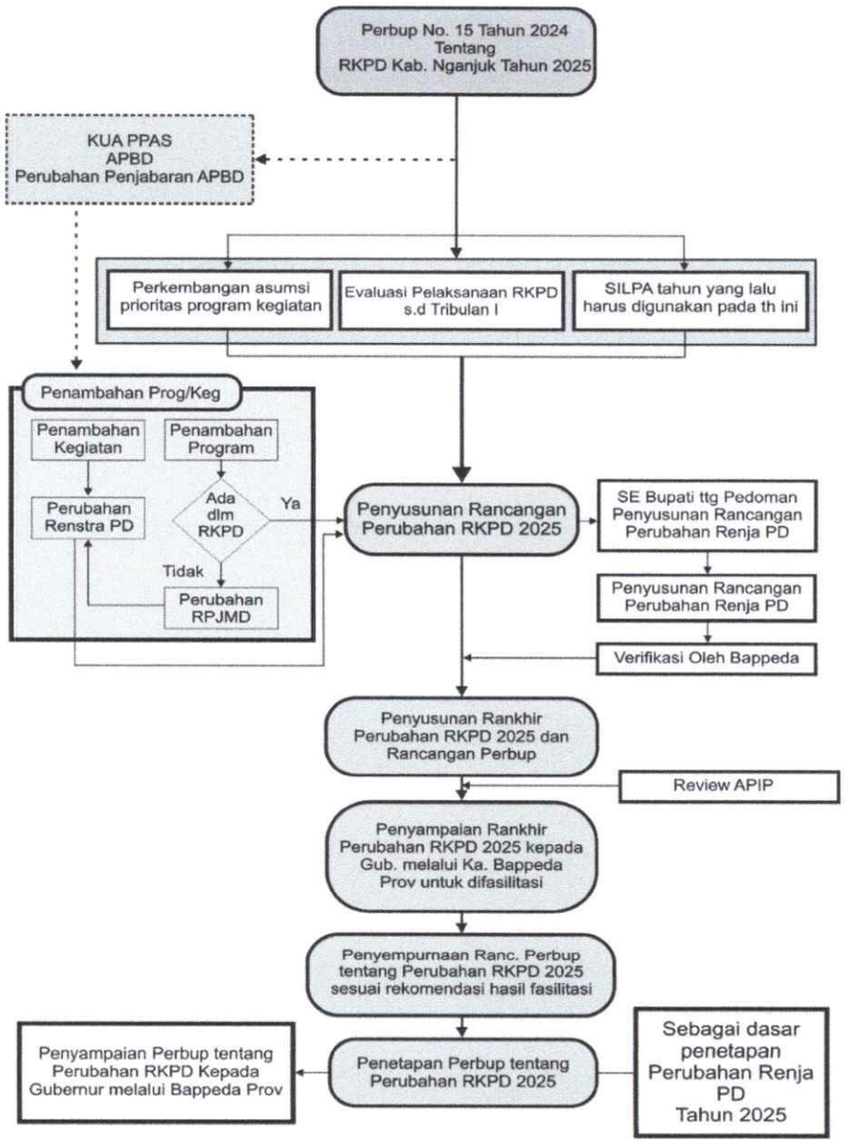
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah




Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pada akhirnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Leuangan Untuk Penangan Pandemi Coorona Virus Disease 2019 (COVID-19)DAN/ATAU Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
33. PERMENDAGRI 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
34. Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

40. Peraturan Menteri Desa No. 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
42. Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 Dan tahun 2024;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (pertama) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi hasil pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026)

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | | |
| *2* | *13* | *01* | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | **Nilai Sakip Dinas PMD** | **78** | **71,7%** | 78 | 246,34% | 315,82 | **78%** | | 3 % |
| **2** | **13** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu** | 14 Dokumen | 100% | **14 Dokumen** | 24 Laporan | 171 % | **14 Dokumen** | 7 Dokumen | 714% |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evalusai Capaian Kinerja OPD | | 11 Laporan | - | | | - | 7 Laporan | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD* | *14 Laporan* | 24 Laporan | *14 Laporan* | 24 Laporan | 171% | *14 Laporan* | 7 Laporan | 50 % |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu** | 96 Dokumen | 96 Dokummen | 96 Dokumen | 96 Dokumen | 100% | **96 Dokumen** | 0 Dokumen | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian Realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | | 27 orang/12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | *34 Orang/ Bulan* | | 27 orang/12 bulan | 27 orang/12 bulan | 100 % | *27 Orang/Bulan* | 31 Orang/ bulan | 91,17 % |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Akhir Tahun | | 2 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | *2 Laporan* | | *2 laporan* | 2 Laporan | 100 % | *2 Laporan* | *2 laporan* | 100 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian Realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | | 68 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuang Bulan/ Triwulanan/ semesteran SKPD* | *68 Laporan* | | *68 Laporan* | ***68 Laporan*** | 100 % | *68 Laporan* | 9 Laporan | 13,23 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tingkat Kehadiran ASN** | 2 Dokumen | 90% | 0% | 0 % | 0 % | **0%** | 0 | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian Realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pembinaan | 1 Unit | 0 Unit | 0% | 0 % | 0 % | 0 Unit | 0 Unit | 0 % |
| | | | | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai* | *1 Unit* | | *- Unit* | *- Unit* | - | *0 Unit* | *- Unit* | - |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | | 1 Paket | - | | | - | | |
| | | | | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya* | *1 Paket* | | *- Paket* | - Paket | 0 % | *0 Paket* | 1 Paket | 0 % |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia** | 3612 Dokumen | 3602 Dokumen | 3612 Dokumen | 3602 Dokumen | **100 %** | **3612 Dokumen** | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Jumlah Barang /Jasa Untuk Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan | | 1 Paket | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | Penerangan Bangunan Kantor | Bangunan Kantor selama 12 Bulan | | | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan* | *1 Paket* | | *1 Paket* | 1 Paket | 100 % | *1 Paket* | 0 Paket | 0 % |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Layanan Untuk Logistik Kantor | | 8 Paket | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan* | *8 Paket* | 8 Paket | *8 Paket* | 8 Paket | 100 % | *8 Paket* | 2 Paket | 25 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan | | 2 Paket | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja rogram utcome)/Kegiatan utput)/Sub Kegiatan ub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan* | *2 Paket* | | *2 Paket* | 2 Paket | 100 % | *2 Paket* | 0 Paket | 0 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan* | *1 Dokumen* | | *1 Dokumen* | 1 Dokumen | 100 % | *1 Dokumen* | *3 Dokumen* | 300 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksana selama 12 Bulan | | 600 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah laporan penyelenggaraan rapat* | *600 Laporan* | | *600 Lapran* | 600 Laporan | 100 % | *600 Dokumen* | 1 Laporan | 0,17 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *koordinasi dan konsultasi SKPD* | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Arsip Yang Terdokumentasi selama 12 Bulan | | 3000 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD* | *3000 Dokumen* | | *3000 Dokumen* | 3000 Dokumen | 100 % | *3000 Dokumen* | 701 Dokumen | 23,37 % |
| 2. | 13 | 02 | 2.07 | X | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 70 unit | 70 Unit | **70 Unit** | 61 Unit | 87 % | **70 Unit** | 0 Unit | 0 % |
| 2. | 13 | 02 | 2.07 | *01* | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Unit endaraan perorangan inas / Kendaraan Dinas abatan yang di sediakan* | *5 Unit Sepeda Motor, Mobil 1 Unit* | | *Sepeda Motor 0 Unit , Mobil* | 0 | 0 | *0 Unit Sepeda Motor, Mobil 0 Unit* | 0 Unit | 0 |
| 2 | 13 | 02 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan | | - | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan* | *0 Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mobil* | | *Sepeda Motor 0 Unit , Mobil* | *Sepeda Motor 0 Unit , Mobil 0Unit* | 0 | *0 Unit Sepeda Motor, Mobil 0 Unit* | *Sepeda Motor 0 Unit , Mobil 0Unit* | 0 |
| 2 . | 13 | 02 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubeler Kursi Rapat | | 52 Unit | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Paket mebel yang disediakan* | *52 Unit* | | *52 Unit* | 52 Unit | 100 % | *52 Unit* | *0 Unit* | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | **13** | **03** | **2.07** | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | | 15 Unit | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan* | *11 Unit* | | *15 Unit* | 15 Unit | 60 % | *9 Unit* | *0 Unit* | 0 % |
| *2* | *13* | *01* | *2.08* | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 50 Laporan | 26 Laporan | **26 Laporan** | 26 Laporan | 100% | **26 Laporan** | 0 Laporan | 0 % |
| *2* | *13* | *01* | *2.08* | 01 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Administrasi Surat Menyurat | | 2 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat* | *2 laporan* | | *2 Laporan* | 2 Laporan | 100 % | *2 Laporan* | 1 Laporan | 50 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| *2* | *13* | *01* | *2.08* | 02 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air ,Listrik dan Layanan Internet Yang Dibayar | | 24 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan* | *48 Laporan* | | *24 Laporan* | *24 Laporan* | 100 % | *24 Laporan* | 6 Laporan | 25 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi** | 145 Unit | 85 Unit | **85 Unit** | 85 Unit | 100 % | **85 Unit** | 0 Unit | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Yang terfasilitasi | | 23 Unit | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Opeasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | *23 Unit* | | *23 Unit* | 23 Unit | 100 % | *23 Unit* | 2 Unit | 8,7 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubeler Yang Difasilitasi | | 20 Unit | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Mebel yang dipelihara* | *52 Unit* | | *20 Unit* | 20 Unit | 100 % | *20 Unit* | 0 Unit | 0 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Difasilitasi | | 40 Unit | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target rogramd n egiatan Renja erangkat aerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/40 |
| | | | | | | *Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara* | *67 Unit* | | 40 Unit | 40 Unit | *100 %* | 40 Unit | 5 Unit | 7,46 % |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Yang Difasilitasi dan Layak Pakai | | 2 Unit | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi* | *2 Unit* | *2 Unit* | 2 Unit | 100% | *2 Unit* | 6 Unit | 0 Unit | 0 % |
| ***2*** | ***13*** | ***02*** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa** | 24% | 27,64 % | **24 %** | 27,64 % | 115,17 % | **24 %** | 0 % | 0 % |
| ***2*** | ***13*** | ***02*** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa** | 63 Desa | 63 Desa | **63 Desa** | 73 Desa | 116 % | **63 Desa** | 0 Desa | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | xx | Pembentukan Penghapusan,Penggabunga Dan Perubahan Status | Jumlah Desa/ Dusun/ RW/ RT Yang Terfasilitasi Pembentukan penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status | | - | - | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan,Penggabungan,dan Perubahan Status Desa* | *5 Desa* | - | - | - | | - | 0 Desa | - |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Tata Wilayah Desa | | 20 Desa | - | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya* | *10 Desa* | | *20 Desa* | 20 Desa | 100 % | *20 Desa* | *0 Desa* | 0 % |

| Kode rekening | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 15 Desa | 30 Desa | 20 Desa | 30 Desa | 150 % | 20 Desa | 0 Desa | 0 % |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 264 Desa | - | - | - | - | - | - | - |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat, Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyrakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenagan Kabupaten /Kota | 5 Laporan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kode rekening | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| *2* | *13* | *02* | 2.01 | Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | | 23 Unit | | | | | | |
| | | | | | *Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa yang terfasilitasi* | *20 Unit* | | *23 Unit* | 23 Unit | 100 % | *23 Unit* | 0 Unit | 0 % |
| *2* | *13* | *03* | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan** | 87% | 87 % | 87 % | 87 % | 100 % | **87 %** | 0 % | 0 % |
| *2* | *13* | *03* | 2.01 | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | **Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan** | 230 Desa | 230 Desa | 230 Desa | 230 Desa | 100 % | **230 Desa** | 0 Desa | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| *2* | *13* | *03* | 2.01 | 01 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/kota | Jumlah Kerjasama Antar Desa Yang Terfasilitasi | | 20 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota* | *20 Dokumen* | | *20 Dokumen* | *20 Dokumen* | 100 % | *20 Dokumen* | 6 Dokumen | 30 % |
| *2* | *13* | *03* | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | Jumlah Kerjasama Antar Desa Yang Terfasilitasi | | 20 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota* | *20 Dokumen* | | *20 Dokumen* | 20 Dokumen | 100 % | *20 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| *2* | *13* | *03* | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Terbina | | 3 Dokumen | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Programdan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan* | *3 Dokumen* | | *3 Dokumen* | 3 Dokumen | 100% | *3 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar** | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 0 % | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dministrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa** | 264 Desa | 263 Desa | 264 Desa | 263 Desa | 100% | **264 Desa** | 0 Desa | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Administrasi Pemerintah Desa | | 5 Dokumen | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2024) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa* | *5 Dokumen* | | *5 Dokumen* | 5 Dokumen | 100 % | *5 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Produk Hukum Desa | | 528 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.* | *528 Dokumen* | | *528 Dokumen* | 528 Dokumen | 100 % | *528 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa | | 264 DOkumen | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.* | *264 Dokumen* | | *264 Dokumen* | 264 Dokumen | 100 % | *264 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Penyaluran Dana Desa | | 263 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | *264 Dokumen* | | *264 Dokumen* | 263 Dokumen | 100 % | *264 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa | Jumlah Desa Yang Melaksanakan Tata Kelola Pemdes dan Administrasi Pemdes serta Penyusunan LPPD,LKPPD,ILPPD dan LPJ | | 80 Orang | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan I tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | *80 Orang* | | *80 0rang* | 80 0rang | 100 % | *80 Orang* | 0 Orang | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Pembinaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | | 20 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa* | *20 Dokumen* | | *20 Dokumen* | 20 Dokumen | 100 % | *20 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Melakukan Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa / PAW | | 1 Laporan | | | | | | |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10) | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan pemilihan, Penganngkatan dan Pemberhentian Kepala Desa* | *1 Laporan* | | *1 Laporan* | 1 Laporan | 100 % | *1 Laporan* | 0 Laporan | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Melakukan Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | 1 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* | *1 Laporan* | | *1 Laporan* | 1 Laporan | 100 % | *1 Laporan* | *0 Laporan* | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Programdan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penyusunan Profil Desa | | 264 DOkumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa Yang tersusun* | *264 Dokumen* | | *264 Dokumen* | 264 Dokumen | 100 % | *264 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | 20 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | *20 Dokumen* | | *20 Dokumen* | 20 Dokumen | 100 % | *20 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah desa yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas BPD | | 80 Orang | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | *80 Orang* | | *80 Orang* | 80 Orang | 100 % | *80 Orang* | 0 Orang | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Programdan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian programdan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 16 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 2 laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 1 Laporan | 50 % |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa Terevaluasi Perkembangan Desa | | 21 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan* | *21 Dokumen* | | *21 Dokumen* | 21 Dokumen | 100 % | *21 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 05 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan** | 32 % | 30 % | 30% | *30%* | 100 % | **30%** | 0 % | 0 % |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ kota serta Pemberdayaan Masyrakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan** | 80 Desa | 80 Desa | 80 Desa | 80 Desa | 100 % | **80 Desa** | **0 Desa** | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat | Jumlah Dokumen hasil Penataan Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Kemasyaraktan Desa/Keluraan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna) Lembaga Adat Dsa dan Masyrakat Hukum Adat | | 240 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat* | *240 Dokumen* | | *240 Dokumen* | 240 Dokumen | 100 % | *240 Dokumen* | 0 Dokumen | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyrakat Hukum Adat | | | | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga* | *240 Lembaga* | 335 Lembaga | *240 Lembaga* | 335 Lembaga | 140 % | *240 Lembaga* | 0 Lembaga | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya* | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dari Propinsi Yang Diikuti ( Lomba Video Kreatif dan Pameran Kampung Kreasi) | | 21 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah* | *20 Dokumen* | | *21 Dokumen* | 21 Dokumen | 100 % | *21 Dokumen* | *0 Dokumen* | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa* | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Desa Terfasilitasi Layanan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | 20 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemenfataan teknologi Tepat Guna* | *20 Laporan* | | *20 Laporan* | 20 Laporan | 100 % | *20 Laporan* | *0 Laporan* | 0 % |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa Yang Aktif Dalam Pelaksanaan Gotong Royong | | 20 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Laporan hasil* | *20 Laporan* | | *20 Laporan* | 20 Laporan | 100 % | *20 Laporan* | 0 Laporan | 0 % |

| Kode rekening | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2024) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Triwulan 1 tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | | | | | *fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PKK Desa ,Kelurahan dan Kecamatan Yang Aktif | | 305 Dokumen | | | | | | |
| | | | | | | *Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK* | *305 Dokumen* | | *305 Dokumen* | 305 Dokumen | 100 % | *305 Dokumen* | 20 Dokumen | 6,55 % |

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | **≥ 91%** | Sangat Tinggi |
| 2. | **76% ≤ 90%** | Tinggi |
| 3. | **66% ≤ 75%** | Sedang |
| 4. | **51% ≤ 65%** | Rendah |
| 5. | **≤ 50%** | Sangat Rendah |

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

| **Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **Capaian Kinerja** | **Predikat** |
|---|---|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 0% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan yang Diambil |
| Adanya efisiensi anggaran | Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja | Mengurangi beberapa anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan |
| Program Penataan Desa | 0% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan yang Diambil |

| Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Capaian Kinerja | Predikat |
|---|---|---|
| Adanya peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) yang sebelumnya tiga indikator menjadi enam indikator | Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja | - |
| Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 0% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan yang Diambil |
| Perjanjian Kerja Sama yang dibuat masih sederhana dan belum menunjukkan menguntungkan bagi pemerintah desa | Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja | - |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | 0% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan yang Diambil |
| Aparat Pemerintahan Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar, pengelolaan data, atau penggunaan teknologi informasi yang efektif | Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja | - |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 0% | Sangat Rendah |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan yang Diambil |
| Tidak semua Lembaga Kemasyarakatan Desa dilibatkan dalam membantu pemerintah desa sesuai tupoksi | Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja | - |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Tahun 2024

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal | Indeks Desa Membangun (IDM) | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan | Indeks Desa Membangun (IDM) | *0,7795* | *0,78191* | *100,3%* |
| | | | Persentase Desa Mandiri | *11,74* | 29,92 | *254,85%* |
| | | | Tingkat Status Perkembangan Desa | *15* | 21,21 | *141,4%* |

## Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Tahun 2025

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Tahun 2025 | Realisasi Tahun 2025 | Capaian Tahun 20254 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal | Indeks Desa Membangun (IDM) | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,7869 | *0* | *0 %* |
| | | | Persentase Desa Mandiri | 13,63 % | 0 | *0 %* |
| | | | Tingkat Status Perkembangan Desa | *18* | 0 | *0 %* |

# Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

| NO | Indikator | Formulasi Perhitungan | | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2024 |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) |
| 1 | Persentase BUM Desa Aktif | Jumlah BUM Desa Bersama Aktif / Jumlah Seluruh BUM Desa Bersama | X 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Desa yang Lembaganya diberdayakan | Jumlah Desa dengan Lembaga Desa yang Diberdayakan / Jumlah Desa | X 100% | 90% | 77% |
| 3 | Persentase Desa yang telah Menyelenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan PPBDesa / Jumlah Desa | X 100% | 10% | 10% |
| 4 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP | Jumlah Desa yang Mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP / Jumlah Desa | X 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase Desa yang telah menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai standart | a. Jumlah Desa yang Meningkat Perkembangan Desanya (PROFIL, PRODESKEL dan IPDESKEL) / Jumlah Desa | X 100% | 100% | 100% |
| | | b. Jumlah Desa dengan Administrasi Pertanggungjawaban Pemerintahan (LPPD) yang baik / Jumlah Desa | X 100% | 100% | 94,3% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c. $\frac{\text{Jumlah Desa dengan Administrasi Keuangan yang baik}}{\text{Jumlah Desa}}$ X 100% | | 100% | 98% |
| | | d. $\frac{\text{Jumlah Desa dengan Administrasi Aset yang baik}}{\text{Jumlah Desa}}$ X 100% | | 88% | 88% |
| | | e. $\frac{\text{Jumlah BUM Desa Meningkat Statusnya}}{\text{Jumlah BUM Desa}}$ X 100% | | 10% | 32% |

# Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

| NO | Indikator | Formulasi Perhitungan | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2025 | Tahun 2025 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Persentase BUM Desa Aktif | Jumlah BUM Desa Bersama Aktif / Jumlah Seluruh BUM Desa Bersama X 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Desa yang Lembaganya diberdayakan | Jumlah Desa dengan Lembaga Desa yang Diberdayakan / Jumlah Desa X 100% | 100% | 80 % | 0 % |
| 3 | Persentase Desa yang telah Menyelenggarakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan PPBDesa / Jumlah Desa X 100% | 25% | 0% | 0% |
| 4 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP | Jumlah Desa yang Mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP / Jumlah Desa X 100% | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Persentase Desa yang telah menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai standart | a. Jumlah Desa yang Meningkat Perkembangan Desanya (PROFIL, PRODESKEL dan IPDESKEL) / Jumlah Desa X 100% | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b. Jumlah Desa dengan Administrasi Pertanggungjawaban Pemerintahan (LPPD) yang baik / Jumlah Desa | X 100% | 100% | 63% | 63 % |
| | | c. Jumlah Desa dengan Administrasi Keuangan yang baik / Jumlah Desa | X 100% | 100% | 25 % | 25 % |
| | | d. Jumlah Desa dengan Administrasi Aset yang baik / Jumlah Desa | X 100% | 88% | 0 % | 0% |
| | | e. Jumlah BUM Desa meningkat statusnya / Jumlah BUM Desa | X 100% | 30% | 32% | 106% |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam ligkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan Dinas Pemberdayaan dan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa.
- Belum Optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
- Pemahaman tugas pokok dan fungi aparatur Pemerintah Desa dalam menunjang pelayanan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.
- Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta pengisian Perangkat Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Dalam pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.
b. Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan dan Desa tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

c. Karena itu guna memenuhi kinerja pelayanan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas PMD dalam menentukan indikator kinerjanya didasarkan pada LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun sebelumnya.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Berikut :

a. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
b. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari jumlah gotong royong dan swadaya masyarakat yang menurun;
d. Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum dilakukan evaluasi menunggu kesiapan pemerintahan desa;
e. Masih banyak desa yang belum menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik terutama aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, data dan administrasi desa;
f. Masih belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDesa Bersama dalam mendukung pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa;
g. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar desa.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2029 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan **ke-1**. Yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.** serta sasaran strategis daerah yaitu **Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Meningkatnya Status Perkembangan Desa.**

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman dan kemauan pemerintah desa dalam memfungsikan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
b. Sebagian besar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa belum memahami tupoksinya
c. Kurangnya penjabaran regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa baik peran, indicator aktif, dll

d. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
e. Kurangnya inovasi bentuk pemberdayaan masyarakat
f. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap regulasi
g. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan Perangkat Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku
h. Kurang berfungsinya peran Badan Permusyawaratan Desa
i. Kurang tertibnya administrasi desa
j. Kurangnya pembinaan tata kelola pemerintahan desa
k. Kurangnya motivasi mengikuti evaluasi tingkat perkembangan desa
l. Pelaksanaan program dan kegiatan di desa belum sesuai sasaran
m. Administrasi keuangan desa yang belum optimal dan belum tepat waktu dalam pelaporan
n. Aset desa belum didata dan dikelola dengan baik
o. Terdapat permasalahan aset desa yang belum tertangani
p. Pengadaan barang dan jasa desa belum dipahami sepenuhnya oleh pelaksana kegiatan
q. Sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna belum digali dan dimanfaatkan secara optimal
r. Lembaga ekonomi masyarakat (BUM Desa dan Bumdesma) belum dikelola secara optimal
s. Pemahaman yang keliru dari Pemerintah desa yang tidak mau meningkat status desanya, karena takut anggaran dana desa berkurang
t. Belum semua Pemerintah Desa memahami tentang penyusunan produk hukum desa dan kurangnya Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Desa
u. Masih banyaknya Pemerintah Desa dalam melakukan pentahapan penyusunan perencanaan dan perencanaan Pembangunan desa yang tidak tepat waktu dan kurangnya Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Desa

v. Aparat Pemerintah Desa yang kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas administrasi. Kurangnya memahami prosedur administrasi yang benar, pengelolaan data, atau penggunaan tekhnologi informasi yang efektif. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan ini dapat menghambat efisiensi dan kualitas administrasi Pemerintahan Desa

w. Proses penyusunan profil desa membutuhkan waktu dan Upaya yang cukup, namun desa seringkali memiliki jadwal yang padat dan Sumber Daya Manusia yang terbatas. Keterbatasan waktu dan personel yang tersedia dapat menghambat pelaksanaan yang efektif dari penyusunan profil desa.

Sedangkan peluang yang didapatkan dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat
b. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara global
c. Potensi swadaya gotong royong dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Nganjuk
d. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) geografis Kabupaten Nganjuk
e. Aksebilitas yang terbuka dengan selesainya pembangunan jalan tol trans Jawa dan rencana pembangunan bandra Kediri pangsa pasar wisatawan dari Surabaya, Solo, Madiun dan sekitarnya terbuka lebar.
f. Berkembangnya wisata di Sarangan dan Tawangmangu menjadi peluang Kabupaten Nganjuk sebagai alternatif tujuan wisata
g. Besarnya potensi keindahan alam dan budaya Kabupaten Nganjuk yang belum dieksplore secara maksimal
h. Terdapat 17 Bumdesma Transformasi Ex PNPM yang sudah berbadan hukum yang memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat sehingga ikut menurunkan tingkat pengangguran di desa

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

| No. | ISU-ISU | Program, Kegiatan |
|---|---|---|
| 1. | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa. | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT<br>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 2. | Belum Optimalnya peran lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 3. | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 4. | Pemahaman tugas pokok dan fungi aparatur Pemerintah Desa dalam menunjang pelayanan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta pengisian Perangkat Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan desa dan aset desa. | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 6. | Belum semua Desa melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penataan Desa dan melaksanakan kerjasama Antar Desa | Bidang Penker<br>PROGRAM PENATAAN DESA<br>Penyelenggaraan Penataan Desa<br>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA<br>Fasilitasi Kerja sama antar Desa |

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan eormasi Struktural".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | Nganjuk | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | Nganjuk | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nganjuk | | | 13.138.500.000 | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Nganjuk | | | 13.353.494.386 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Nganjuk | Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 78 | 7.584.500.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Nganjuk | Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 78 | 7.126.494.386 | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, | Nganjuk | Jumlah Dokumen | 14 Laporan | 41.000.000 | Perencanaan, Penganggara | Nganjuk | Jumlah Dokumen | 18 Dokumen | 59.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun | | | n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun | | | |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 14 Laporan | 41.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 18 Laporan | 59.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nganjuk | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 96 Dokumen | 5.034.200.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nganjuk | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 96 Dokumen | 5.131.344.000 | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nganjuk | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/Bulan | 5.017.200.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nganjuk | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/Bulan | 5.113.344.000 | |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 7.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nganjuk | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 8.000.000 | |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Nganjuk | Jumlah Laporan Keuangan | 68 Laporan | 10.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Nganjuk | Jumlah Laporan Keuangan | 72 Laporan | 10.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD | | | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD | | | |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nganjuk | Tingkat Kehadiran ASN | 2 Dokumen | 12.800.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nganjuk | Tingkat Kehadiran ASN | 2 Dokumen | 18.481.500 | |
| 1.3.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Nganjuk | Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 4.800.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Nganjuk | Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | 0 Unit | 0 | |
| 1.3.2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta | Nganjuk | Jumlah Paket Pakaian | 1 Paket | 8.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas | Nganjuk | Jumlah Paket Pakaian | 1 Paket | 18.481.500 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | atribut kelengkapannya | | Dinas beserta atribut Kelengkapannya | | | beserta atribut kelengkapannya | | Dinas beserta atribut Kelengkapannya | | | |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nganjuk | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3612 Dokumen | 393.500.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nganjuk | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3633 Dokumen | 418.915.250 | |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Nganjuk | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan | 1 Paket | 10.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Nganjuk | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan | 10 Paket | 10.000.000 | |
| 1.4.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nganjuk | Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan | 8 Paket | 100.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nganjuk | Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan | 9 Paket | 110.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nganjuk | Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan | 2 Paket | 5.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nganjuk | Jumlah paket barang Cetakan dan pengganda an yang di sediakan | 2 Paket | 7.000.000 | |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nganjuk | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 1 Dokume n | 3.500.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nganjuk | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 3.500.000 | |
| 1.4.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nganjuk | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 600 Laporan | 250.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nganjuk | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 600 Laporan | 260.000.000 | |
| 1.4.6 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Nganjuk | Jumlah Dokumen penata | 3.000 Dokume n | 25.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis | Nganjuk | Jumlah Dokumen penata | 3.000 Dokumen | 28.415.250 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | SKPD | | usahan arsip dinamis pada SKPD | | | pada SKPD | | usahan arsip dinamis pada SKPD | | | |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan | 70 Unit | 1.242.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan | 105 Unit | 592.384.857 | |
| 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan | Nganjuk | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan | 5 Unit Sepeda Motor, Mobil 1 Unit | 775.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan | Nganjuk | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan | - | 0 | |
| 1.5.2 | Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan | Nganjuk | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional | 0 Unit Sepeda Motor, 1 Unit | 300.000.000 | Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan | Nganjuk | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona | 5 Unit Sepeda Motor | 174.109.827 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | / lapangan yang disediakan | Mobil | | | | l/ lapangan yang disediakan | | | |
| 1.5.3 | Pengadaan Mebel | Nganjuk | Jumlah Paket mebel yang disediakan | 52 Unit | 45.000.000 | Pengadaan Mebel | Nganjuk | Jumlah Paket mebel yang disediakan | 55 Unit | 140.013.570 | |
| 1.5.4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan | 11 Unit | 122.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan | 25 Unit | 278.261.460 | |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nganjuk | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 Laporan | 131.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nganjuk | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 Laporan | 132.276.000 | |
| 1.6.1 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Nganjuk | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat | 2 Laporan | 25.000.000 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Nganjuk | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat | 2 Laporan | 25.276.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.6.2 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nganjuk | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 48 Laporan | 106.000.000 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nganjuk | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 24 Laporan | 107.000.000 | |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan | 145 Unit | 730.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nganjuk | Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan | 145 Unit | 774.092.779 | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nganjuk | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya | 23 Unit | 320.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nganjuk | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya | 7 Unit | 320.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Mebel | Nganjuk | Jumlah unit Mebel yang di pelihara | 52 Unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Nganjuk | Jumlah unit Mebel yang di pelihara | 33 Unit | 15.000.000 | |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 67 Unit | 50.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nganjuk | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 67 Unit | 50.620.000 | |
| 1.7.4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nganjuk | Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi | 2 Unit | 350.000.000 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nganjuk | Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi | 2 Unit | 388.472.779 | |
| 2 | PROGRAM PENATAAN DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa | 24% | 266.000.000 | PROGRAM PENATAAN DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa | 24% | 332.000.000 | |
| 2.1 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi | 63 Desa | 266.000.000 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan | 63 Desa | 332.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Penataan Desa | | | | | Fasilitasi Penataan Desa | | | |
| 2.1.1 | Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status | Nganjuk | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 5 Desa | 15.000.000 | Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status | Nganjuk | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 10 Desa | 25.000.000 | |
| 2.1.2 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 10 Desa | 145.000.000 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 10 Desa | 195.000.000 | |
| 2.1.3 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 15 Desa | 25.000.000 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 26 Desa | 30.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 2.1.4 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 264 Desa | 5.000.000 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Nganjuk | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 0 Desa | 0 | |
| 2.1.5 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5 Laporan | 6.000.000 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten /Kota | 0 Laporan | 0 | |
| 2.1.6 | Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | Nganjuk | Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa | 20 Unit | 70.000.000 | Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | Nganjuk | Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa | 20 Unit | 82.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama | 87% | 200.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi | 87% | 209.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | dan Pembangunan | | | | | Kerjasama dan Pembangunan | | | |
| 3.1 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan | 230 Desa | 200.000.000 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan | 230 Desa | 209.000.000 | |
| 3.1.1 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota | 20 Dokumen | 139.000.000 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten /Kota | 20 Dokumen | 142.000.000 | |
| 3.1.2 | Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota | 20 Dokumen | 15.000.000 | Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten /Kota | 10 Dokumen | 17.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3.1.3 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | 3 Dokumen | 46.000.000 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | 3 Dokumen | 50.000.000 | |
| 4 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa | 100% | 4.426.000.000 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa | 100% | 4.690.000.000 | |
| 4.1.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administras | 264 Desa | 4.426.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan | 264 Desa | 4.690.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | i Tata Kelola Pemerintahan Desa | | | | | Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa | | | |
| 4.1.2 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 5 Dokumen | 16.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 4 Dokumen | 20.000.000 | |
| 4.1.3 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 528 Dokumen | 75.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 528 Dokumen | 100.000.000 | |
| 4.1.4 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 264 Dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 264 Dokumen | 50.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4.1.5 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa | 264 Dokumen | 3.500.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa | 872 Dokumen | 3.500.000.000 | |
| 4.1.6 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa | Nganjuk | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 80 Orang | 50.000.000 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa | Nganjuk | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 100 Orang | 200.000.000 | |
| 4.1.7 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa | 20 Dokumen | 185.000.000 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa | 40 Dokumen | 185.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4.1.8 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan | 260.000.000 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan | 270.000.000 | |
| 4.1.9 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | Nganjuk | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Laporan | 40.000.000 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | Nganjuk | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| 4.1.10 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Profil Desa | 264 Dokumen | 30.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Profil Desa | 264 Dokumen | 40.000.000 | |
| 4.1.11 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 20 Dokumen | 40.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 20 Dokumen | 40.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 4.1.12 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Nganjuk | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 80 Orang | 30.000.000 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Nganjuk | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 100 Orang | 75.000.000 | |
| 4.1.13 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Nganjuk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 2 Laporan | 70.000.000 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Nganjuk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 264 Laporan | 80.000.000 | |
| 4.1.14 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Nganjuk | Jumalah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa | 21 Dokumen | 80.000.000 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Nganjuk | Jumalah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa | 21 Dokumen | 80.000.000 | |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, | Nganjuk | Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya | 32% | 662.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARA | Nganjuk | Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya | 57% | 996.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | diberdayakan | | | KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | diberdayakan | | | |
| 5.1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan | 80 Desa | 662.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah | Nganjuk | Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan | 150 Desa | 996.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | |
| 5.1.1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat | 240 Dokumen | 60.000.000 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat | 703 Dokumen | 25.000.000 | |
| 5.1.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Nganjuk | Jumlah Lembaga Kemasyarak | 240 Lembaga | 85.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | Nganjuk | Jumlah Lembaga Kemasyara | 584 Lembaga | 146.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat | | atan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaru na), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatka n kapasitasny a | | | Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat | | katan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaru na), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatka n kapasitasn ya | | | |
| 5.1.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatk an Pendapatan | 20 Dokume n | 32.000.000 | Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkat kan Pendapata | 9 Dokumen | 50.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | a Asli Desa | | | | | na Asli Desa | | | |
| 5.1.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna | 20 Laporan | 10.000.000 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Nganjuk | Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna | 52 Laporan | 150.000.000 | |
| 5.1.5 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Nganjuk | Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | 20 Laporan | 25.000.000 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Nganjuk | Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | 22 Laporan | 125.000.000 | |
| 5.1.6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan | 305 Dokumen | 450.000.000 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan | Nganjuk | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan | 180 Dokumen | 500.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK | | | Kesejahteraan Keluarga | | Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga PKK | | | |

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyaakat dan Desa, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Nihil | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 Untuk mencapai target sasaran Pembangunan Tahun 2025 pada peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional yaitu ;

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Pengutan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenia dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba Judi dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat beragama untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur;

   Dalam pencapaian prioritas pembangunan Nasional tahun 2025 mununtut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "***Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan***", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "***Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa***", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

| Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|
| Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan | Indeks Desa Membangun | 0,7869 |
| Sasaran Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 |
| Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa | Persentase Desa Mandiri | 13,63 % |
| | Tingkat Status Perkembangan Desa | 18 % |

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 mempedomani agenda

pembangunan nasional dan Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu **"Peningkatan Produktifitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM Koperasi, MUM Desa dan Mendorongn Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
2. Mengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
# TAHUN 2025

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai SAKIP | 78.5 | Nilai | 23,081,208,000 | 71.7 | Nilai | 5,451,070,674 | **80** | **Nilai** | **6,227,402,191** | | **Nilai** | 606,816,974 | - | 10 | 71.7 | **Nilai** | 6,057,887,648 | 91.34 | 26.25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun | 43 | dok | 126,000,000 | 10 | dok | 30,119,680 | **14** | **dok** | **39,307,200** | 7 | **dok** | 27,827,250 | 50 | 71 | 17 | **dok** | 57,946,930 | 39.53 | 45.99 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 42 | Lap | 126,000,000 | 9 | Lap | 30,119,680 | 14 | Lap | 39,307,200 | 7 | Lap | 27,827,250 | 50 | 71 | 16 | Lap | 57,946,930 | 38.10 | 45.99 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 288 | dok | 18,316,608,000 | 96 | dok | 4,074,169,125 | **105** | **dok** | **5,147,201,059** | 0 | **dok** | 463,146,691 | - | 9 | 71.7 | **dok** | 4,537,315,816 | 24.90 | 24.77 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 | org/bln | 18,262,608,000 | 108 | org/bln | 4,054,584,885 | 31 | org/bln | 5,134,488,059 | 31 | org/bln | 462,426,691 | 100 | 9 | 139 | org/bln | 4,517,011,576 | 408.82 | 24.73 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 | Lap | 24,000,000 | 2 | Lap | 4,629,920 | 2 | Lap | 5,691,000 | 2 | Lap | 720,000 | 100 | 13 | 4 | Lap | 5,349,920 | 66.67 | 22.29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD | 204 | Lap | 30,000,000 | 68 | Lap | 14,954,320 | 72 | Lap | 7,022,000 | 9 | Lap | - | 13 | - | 77 | Lap | 14,954,320 | 37.75 | 49.85 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3612 | dok | 1,251,000,000 | 3602 | dok | 494,926,307 | **3.62** | **dok** | **379,620,800** | 0 | **dok** | 21,706,324 | - | 6 | 71.7 | **dok** | 516,632,631 | 1.99 | 41.30 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan | 3 | Paket | 30,000,000 | 1 | Paket | 12,004,200 | 1 | Paket | 9,998,900 | 0 | Paket | 6,691,500 | - | 67 | 1 | Paket | 18,695,700 | 33.33 | 62.32 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan | 24 | Paket | 330,000,000 | 8 | Paket | 74,667,898 | 8 | Paket | 57,975,400 | 2 | Paket | 9,651,220 | 25 | 17 | 10 | Paket | 84,319,118 | 41.67 | 25.55 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan | 6 | Paket | 21,000,000 | 2 | Paket | 3,049,170 | 2 | Paket | 2,152,500 | 0 | Paket | - | - | - | 2 | Paket | 3,049,170 | 33.33 | 14.52 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan | 3 | dok | 12,000,000 | 1 | dok | 2,160,000 | 12 | dok | 3,000,000 | 3 | dok | 360,000 | 25 | 12 | 4 | dok | 2,520,000 | 133.33 | 21.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1800 | Lap | 780,000,000 | 584 | Lap | 377,829,691 | 550 | Lap | 277,928,000 | 1 | Lap | 376,000 | 0 | 0 | 585 | Lap | 378,205,691 | 32.50 | 48.49 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD | 9000 | dok | 78,000,000 | 3000 | dok | 25,215,348 | 3000 | dok | 28,566,000 | 701 | dok | 4,627,604 | 23 | 16 | 3701 | dok | 29,842,952 | 41.12 | 38.26 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah Pada yang di sediakan | 223 | unit | 597,100,000 | 67 | unit | 238,291,000 | **6** | **unit** | **61,630,308** | 0 | **unit** | - | - | - | 67 | **unit** | 238,291,000 | 30.04 | 39.91 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket mebel yang disediakan | 159 | Unit | 122,000,000 | 52 | Unit | 55,386,000 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | | | 52 | Unit | 55,386,000 | 32.70 | 45.40 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan mesinLainnya yang di sediakan | 47 | Unit | 475,100,000 | 15 | Unit | 182,905,000 | 6 | Unit | 61,630,308 | 0 | Unit | - | - | - | 15 | Unit | 182,905,000 | 31.91 | 38.50 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 150 | Lap | 395,500,000 | 26 | Lap | 83,195,484 | **50** | **Lap** | **88,276,000** | 0 | **Lap** | 14,934,603 | - | 17 | 26 | **Lap** | 98,130,087 | 17.33 | 24.81 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.08.0001 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat | 6 | Lap | 75,500,000 | 2 | Lap | 23,296,348 | 2 | Lap | 26,276,000 | 1 | Lap | 4,377,603 | 50 | 17 | 3 | Lap | 27,673,951 | 50.00 | 36.65 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.08.0002 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Air dan Listrik yang disediakan | 144 | Lap | 320,000,000 | 24 | Lap | 59,899,136 | 24 | Lap | 62,000,000 | 6 | Lap | 10,557,000 | 25 | 17 | 30 | Lap | 70,456,136 | 20.83 | 22.02 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan | 382 | Unit | 2,395,000,000 | 85 | Unit | 530,369,078 | **69** | **Unit** | **511,366,824** | 0 | **Unit** | 79,202,106 | - | 15 | 85 | **Unit** | 609,571,184 | 22.25 | 25.45 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya. | 36 | Unit | 960,000,000 | 23 | Unit | 336,459,706 | 7 | Unit | 295,862,443 | 2 | Unit | 32,107,300 | 29 | 11 | 25 | Unit | 368,567,006 | 69.44 | 38.39 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit Mebel yang di pelihara | 97 | Unit | 35,000,000 | 20 | Unit | 3,243,000 | 20 | Unit | 3,302,754 | 0 | Unit | - | - | - | 20 | Unit | 3,243,000 | 20.62 | 9.27 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang | 67 | Unit | 150,000,000 | 40 | Unit | 38,228,703 | 40 | Unit | 38,850,000 | 5 | Unit | - | 13 | - | 45 | Unit | 38,228,703 | 67.16 | 25.49 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi | 2 | Unit | 1,250,000,000 | 2 | Unit | 152,437,669 | 2 | Unit | 173,351,627 | 0 | Unit | 47,094,806 | - | 27 | 2 | Unit | 199,532,475 | 100.00 | 15.96 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan | 25 | % | 900,000,000 | 27 | % | 135,626,498 | **25** | **%** | **63,964,100** | 0 | **%** | - | - | - | 27 | **%** | 135,626,498 | 108.00 | 15.07 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.02.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa | 189 | Desa | 900,000,000 | 63 | Desa | 135,626,498 | **66** | **Desa** | **63,964,100** | 0 | **Desa** | - | - | - | 63 | **Desa** | 135,626,498 | 33.33 | 15.07 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 5 | Desa | 20,000,000 | 0 | Desa | - | 1 | Desa | 11,017,650 | 0 | Desa | - | - | - | 0 | Desa | - | 0.00 | 0.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Penataan Wilayah | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 45 | Desa | 585,000,000 | 20 | Desa | 81,556,798 | 30 | Desa | 30,685,000 | 0 | Desa | - | - | - | 20 | Desa | 81,556,798 | 44.44 | 13.94 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 60 | Desa | 90,000,000 | 30 | Desa | 12,397,000 | 25 | Desa | 7,779,200 | 0 | Desa | - | - | - | 30 | Desa | 12,397,000 | 50.00 | 13.77 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa | 60 | Unit | 225,000,000 | 23 | Unit | 41,672,700 | 10 | Unit | 14,482,250 | 0 | Unit | - | - | - | 23 | Unit | 41,672,700 | 38.33 | 18.52 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.03.** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif | 87 | % | 627,000,000 | 70 | % | 150,267,796 | **87%** | **%** | **121,864,950** | 0 | **%** | 12,055,200 | - | 10 | 70 | **%** | 162,322,996 | 80.46 | 25.89 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.03.2.01** | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan | 230 | Desa | 627,000,000 | 230 | Desa | 150,267,796 | **230** | **Desa** | **121,864,950** | 0 | **Desa** | 12,055,200 | - | 10 | 230 | **Desa** | 162,322,996 | 100.00 | 25.89 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 60 | dok | 426,000,000 | 20 | dok | 101,457,514 | 10 | dok | 84,693,850 | 6 | dok | 7,940,588 | 60 | 9 | 26 | dok | 109,398,102 | 43.33 | 25.68 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.03.2.01.0002 | Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 60 | dok | 50,000,000 | 20 | dok | 6,113,300 | 15 | dok | 5,047,750 | 0 | dok | - | - | - | 20 | dok | 6,113,300 | 33.33 | 12.23 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | 9 | dok | 151,000,000 | 3 | dok | 42,696,982 | 2 | dok | 32,123,350 | 0 | dok | 4,114,612 | - | 13 | 3 | dok | 46,811,594 | 33.33 | 31.00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar | 100 | % | 13,521,000,000 | 38 | % | 5,365,595,355 | **100** | **%** | **3,318,503,825** | 0 | **%** | 607,667,840 | - | 18 | 38 | **%** | 5,973,263,195 | 38.00 | 44.18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa | 264 | Desa | 13,521,000,000 | 263 | Desa | 5,365,595,355 | **264** | **Desa** | **3,318,503,825** | 0 | **Desa** | 607,667,840 | - | 18 | 263 | **Desa** | 5,973,263,195 | 99.62 | 44.18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 15 | dok | 61,000,000 | 5 | dok | 9,997,000 | 4 | dok | 8,201,900 | 0 | dok | - | - | - | 5 | dok | 9,997,000 | 33.33 | 16.39 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa. | 528 | dok | 240,000,000 | 528 | dok | 89,676,356 | 528 | dok | 59,168,500 | 0 | dok | - | - | - | 528 | dok | 89,676,356 | 100.00 | 37.37 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. | 264 | dok | 175,000,000 | 264 | dok | 36,901,000 | 264 | dok | 25,273,500 | 0 | dok | - | - | - | 264 | dok | 36,901,000 | 100.00 | 21.09 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa | 264 | dok | 10,500,000,000 | 263 | dok | 4,790,569,434 | 264 | dok | 2,907,391,775 | 0 | dok | 574,010,340 | - | 20 | 263 | dok | 5,364,579,774 | 99.62 | 51.09 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 280 | Orang | 190,000,000 | 80 | Orang | 144,708,000 | 100 | Orang | 8,400,500 | 0 | Orang | 33,657,500 | - | 401 | 80 | Orang | 178,365,500 | 28.57 | 93.88 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa | 20 | dok | 555,000,000 | 20 | dok | 58,874,055 | 80 | dok | 39,704,750 | 0 | dok | - | - | - | 20 | dok | 58,874,055 | 100.00 | 10.61 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 | Lap | 810,000,000 | 1 | Lap | 101,671,000 | 1 | Lap | 167,358,500 | 0 | Lap | - | - | - | 1 | Lap | 101,671,000 | 100.00 | 12.55 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 3 | Lap | 150,000,000 | 1 | Lap | 5,290,000 | 1 | Lap | 7,279,400 | 0 | Lap | - | - | - | 1 | Lap | 5,290,000 | 33.33 | 3.53 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | 264 | dok | 120,000,000 | 264 | dok | 20,590,062 | 264 | dok | 9,056,000 | 0 | dok | - | - | - | 264 | dok | 20,590,062 | 100.00 | 17.16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 20 | dok | 120,000,000 | 20 | dok | 39,266,448 | 264 | dok | 29,362,200 | 0 | dok | - | - | - | 20 | dok | 39,266,448 | 100.00 | 32.72 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas | 80 | Orang | 120,000,000 | 80 | Orang | 19,529,500 | 100 | Orang | 6,078,800 | 0 | Orang | - | - | - | 80 | Orang | 19,529,500 | 100.00 | 16.27 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 6 | Lap | 240,000,000 | 3 | Lap | 19,772,500 | 2 | Lap | 7,618,000 | 1 | Lap | - | 50 | - | 4 | Lap | 19,772,500 | 66.67 | 8.24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | JumlaH dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa | 21 | dok | 240,000,000 | 21 | dok | 28,750,000 | 21 | dok | 43,610,000 | 0 | dok | - | - | - | 21 | dok | 28,750,000 | 100.00 | 11.98 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan | 57 | % | 2,222,000,000 | 28 | % | 752,017,036 | **45** | **%** | **614,644,600** | 0 | **%** | 6,855,200 | - | 1 | 28 | **%** | 758,872,236 | 49.12 | 34.15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan | 264 | Desa | 2,222,000,000 | 80 | Desa | 752,017,036 | **118** | **Desa** | **614,644,600** | 0 | **Desa** | 6,855,200 | - | 1 | 80 | **Desa** | 758,872,236 | 30.30 | 34.15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat | 720 | dok | 195,000,000 | 240 | dok | 14,482,000 | 300 | dok | 76,049,450 | 0 | dok | - | - | - | 240 | dok | 14,482,000 | 33.33 | 7.43 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) | Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 | | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9=8/7 x 100% | | 10=6+8 | | | 11=10/5 X 100 | | 12 | 13 |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | | |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 720 | Lembaga | 270,000,000 | 335 | Lembaga | 105,734,000 | 384 | Lembaga | 64,214,150 | 0 | Lembaga | - | - | - | 335 | Lembaga | 105,734,000 | 46.53 | 39.16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa | 60 | dok | 107,000,000 | 21 | dok | 39,503,000 | 2 | dok | 14,842,800 | 0 | dok | - | - | - | 21 | dok | 39,503,000 | 35.00 | 36.92 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna | 60 | Lap | 45,000,000 | 20 | Lap | 84,586,000 | 2 | Lap | 62,784,000 | 0 | Lap | - | - | - | 20 | Lap | 84,586,000 | 33.33 | 187.97 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | 60 | Lap | 105,000,000 | 20 | Lap | 94,490,000 | 1 | Lap | 29,102,700 | 0 | Lap | - | - | - | 20 | Lap | 94,490,000 | 33.33 | 89.99 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK | 305 | dok | 1,500,000,000 | 305 | dok | 413,222,036 | 110 | dok | 367,651,500 | 20 | dok | 6,855,200 | 18 | 2 | 325 | dok | 420,077,236 | 106.56 | 28.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Daerah | Alokasi 2025 (Rp.) |
|---|---|---|
| 1 | Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi dan elektronik government menuju pemerintahan yang baik dan | Rp. 11.067.688.425,- ,- |

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2025 | Alokasi 2025 (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa | Persentase Desa Mandiri | 31,81% 84 Desa | Rp. 11.067.688.425,- |
| | | Tingkat Status Perkembangan Desa | 13,63 | |

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | Uraian (Output) | Target | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **11.066.688.425** |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | **80** | **6.390.323.132** |
| 1.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun** | **18 Laporan** | **39.307.200** |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 18 Dokumen | 39.307.200 |
| 1.2 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **30 orang/12 bulan** | **5.254.868.000** |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/Bulan | 5.242.155.000 |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 5.691.000 |
| 1.2.3. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD | 75 Laporan | 7.022.000 |
| 1.3 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tingkat Kehadiran ASN** | 0 Dokumen | **0** |
| 1.3.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya | 0 Paket | 0 |
| 1.4 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3612 Dokumen** | **368.620.850** |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan | 1 Paket | 29.998.900 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan | 8 Paket | 57.975.400 |
| 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan | 2 Paket | 2.152.500 |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 12 Dokumen | 3.000.000 |
| 1.4.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 550 Laporan | 246.928.000 |
| 1.4.6 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD | 3.000 Dokumen | 28.566.000 |
| 1.5 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan** | **7 Unit** | **82.054.308** |
| 1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan | - | 0 |
| 1.5.2 | Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ lapangan yang disediakan | 0 Unit Sepeda Motor | 0 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 1.5.3 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket mebel yang disediakan | 0 Unit | 0 |
| 1.5.4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan | 7 Unit | 82.054.308 |
| 1.6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **26 Laporan** | **88.276.000** |
| 1.6.1 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat | 2 Laporan | 26.276.000 |
| 1.6.2 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 24 Laporan | 62.000.000 |
| 1.7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan** | **69 Unit** | **557.196.824** |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya | 7 Unit | 310.692.443 |
| 1.7.2 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit Mebel yang di pelihara | 20 Unit | 3.302.754 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 40 Unit | 38.850.000 |
| 1.7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi | 2 Unit | 204.351.627 |
| 2 | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa** | **25%** | **91.964.100** |
| 2.1 | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa** | **66 Desa** | **91.964.100** |
| 2.1.1 | Pembentukan Penghapusan ,Penggabungan dan Perubahan Status | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 1 Desa | 11.017.650 |
| 2.1.2 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 30 Desa | 30.685.000 |
| 2.1.3 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 25 Desa | 7.779.200 |
| 2.1.4 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 0 | 0 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.5 | Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Laporan hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa | Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa | 10 Unit | 42.482.250 |
| 3 | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan** | **87%** | **121.864.950** |
| 3.1 | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | **Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan** | **230 Desa** | **121.864.950** |
| 3.1.1 | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 84.693.850 |
| 3.1.2 | Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 15 Dokumen | 5.047.750 |
| 3.1.3 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 Dokumen | 32.123.350 |
| 4 | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa** | **100%** | **3.744.145.793** |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa | 264 Desa | **3.744.145.793** |
| 4.1.2 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa | 1 Dokumen | 8.201.900 |
| 4.1.3 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa | 528 Dokumen | 59.168.500 |
| 4.1.4 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 264 Dokumen | 25.273.500 |
| 4.1.5 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa | 264 Dokumen | 3.323.033.743 |
| 4.1.6 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 50 Orang | 8.400.500 |
| 4.1.7 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa | 40 Dokumen | 49.704.750 |
| 4.1.8 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa | Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, | 1 Laporan | 167.358.500 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | |
| 4.1.9 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Laporan | 7.279.400 |
| 4.1.10 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | 264 Dokumen | 9.056.000 |
| 4.1.11 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 20 Dokumen | 29.362.200 |
| 4.1.12 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 50 Orang | 6.078.800 |
| 4.1.13 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | 2 Laporan | 7.618.000 |
| 4.1.14 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumalah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa | 21 Dokumen | 43.610.000 |
| 5 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan** | **32%** | **719.390.450** |
| 5.1 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan** | **84 Desa** | **719.390.450** |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | **serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | |
| 5.1.1 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat | 300 Dokumen | 76.049.450 |
| 5.1.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya | 384 Lembaga | 64.214.150 |
| 5.1.3 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa | 2 Dokumen | 24.842.800 |
| 5.1.4 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam | 2 Laporan | 62.784.000 |

| No. | Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | pemanfataan teknologi Tepat Guna | | |
| 5.1.5 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan | 29.102.700 |
| 5.1.6 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK | 110 Dokumen | 462.397.350 |

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jenis Belanja | Sasaran Penerima Manfaat | | | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nama Objek | Jumlah | Rincian | |
| 1. | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | Perangkat Desa : | | | |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Bantuan Keuangan | 1. Kepala Desa | Rp. 158.400.000 | 528 X Rp 300.000 | BKK Propinsi |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | 2.Sekretaris Desa | Rp. 145.200.000 | 528 X Rp 275.000 | |
| | | | 3. Kepala Seksi | Rp. 396.000.000 | 1584XRp 250.000 | |
| | | | 4. Kepala Urusan | Rp. 396.000.000 | 1584XRp 250.000 | |
| | | | 5. Kepala Dusun | Rp. 381.000.000 | 1524XRp 250.000 | |
| | | | 6. Staf Desa | Rp. 211.200.000 | 1056XRp 200.000 | |
| | | **Total** | | **Rp. 1.687.800.000** | | |

Sumber data : Pergeseran DPA Ke II 2024

# BAB IV
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

## 4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja,

serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001